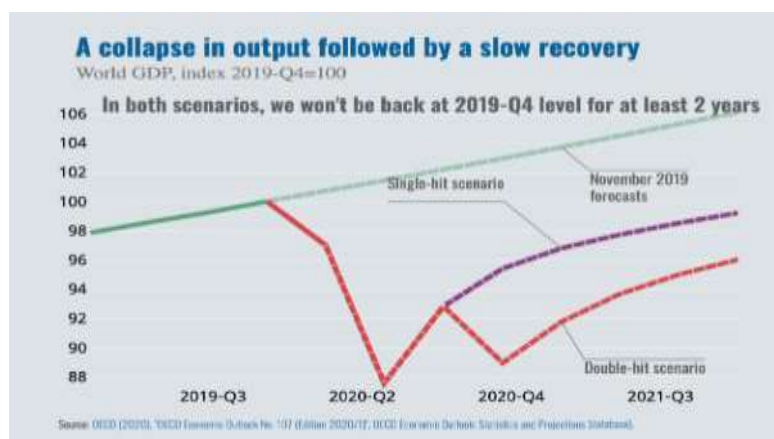


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona virus disease-2019 yang disingkat menjadi COVID 19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2* (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau *SARS-COV-2*). Virus ini biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan (Amri 2020). Penyebarannya yang telah meluas di Indonesia sangat memberikan dampak terhadap berbagai sektor perekonomian. Serta berdampak sangat besar terhadap UMKM di hampir semua sektor seperti kerajinan, kuliner, industri kreatif, fashion, pariwisata, kosmetik dan sebagainya. Bahkan pandemi COVID 19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dunia, dilansir melalui laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi global turun 6% pada tahun 2019 dan pengangguran naik menjadi 9,2% dari 5,4% pada 2019, serta pertumbuhan pendapatan lima tahun hilang di seluruh ekonomi pada tahun 2021.



Gambar 1.1 Grafik penurunan ekonomi global

(Sumber laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD))

Pandemi COVID 19 memberikan ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak perusahaan, menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya investasi saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidak pastian, dimana dampak yang sangat dirasakan di Indonesia terutama keberadaan UMKM. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional, dimana mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dinyatakan bahwa untuk memperkuat daya saing bangsa, salah satu kebijakan pembangunan dalam jangka panjang adalah memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif, perwujudan kebijakan ini dapat dilakukan salah satunya adalah melalui pengembangan UMKM. Definisi UMKM dalam penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomer 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Data dari Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUMKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 62.922.617 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sedangkan pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) selalu meningkat tiap tahunnya dan memperkejakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi) (Kemenkop, 2018).

Adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja UMKM dari segi sisi penjualan karena menurunnya konsumsi dan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar UMKM yang mengalami penurunan kinerja bisnisnya sangat drastis dan hanya sampai level dimana usaha yang dijalaninya

tetap bertahan hidup. Namun sebagian dari UMKM yang mengalami penurunan tersebut pada akhirnya tidak bisa bertahan dan bahkan berhenti beroperasi sama sekali. Data dari kementerian koperasi pada tahun 2020 menyatakan bahwa sekitar 37.000 UMKM sedang mengalami tekanan keterpurukan akibat terdampak serius dengan adanya pandemic COVID 19, dilihat dari sekitar 56 persen memberikan laporan bahwa terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Kristian 2020). Sehingga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 melakukan survei terdapat 6.405 responden. Dimana daerah responden meliputi lebih dari 50 persen di Jawa dan Bali, sisanya tersebar di seluruh Indonesia . Penurunan penjualan yang dirasakan oleh hampir seluruh UMKM, sebanyak 36,7%, serta responden mengakui terdapat penurunan lebih dari 60%. Di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan.



Gambar 1.2 Persentase penurunan penjualan pada UMKM tahun 2020

(Sumber Survei oleh (Bappenas) pada tahun 2020)

Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan ke pada pelaku UMKM diantaranya dengan kelonggaran pembayaran cicilan hutang atau kredit bagi UMKM atau bahkan penundaan proses pembayaran tersebut sampai enam bulan kedepan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan UMKM. Termasuk juga menyederhanakan proses administrasi mendapatkan pinjaman di tengah situasi darurat ini. Serta pemerintah juga telah menyiapkan dana mencapai Rp 174,50 triliun yang meliputi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 167,30 triliun dan Dana Desa Rp 7,20 triliun, sedangkan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dari total anggaran Rp 405,1 triliun, serta Rp 150 triliun yang akan dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional mengatasi pandemi COVID 19 melalui APBN 2020 (SP-27/KLI/2020). Hal ini dapat dilakukan agar supaya para pelaku UMKM termasuk para pekerja tetap dapat menjaga tingkat konsumsi dan daya belinya sekaligus mendukung berjalannya roda perekonomian nasional. Pemerintah juga melakukan peraturan protocol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, dimana pemerintah memberi izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya. Kewajiban penggunaan masker, sarung tangan, dan jaga jarak aman antar pekerja dapat dijadikan persyaratan bagi UMKM untuk terus menjalankan aktivitasnya.

Bantuan yang di berikan oleh pemerintah membantu para pelaku UMKM dapat melakukan *sustainability* atau keberlanjutan dari bisnis yang dijalaninya, banyak pelaku UMKM yang melakukan survival agar dapat bertahan hidup serta melakukan perubahan dalam bisnisnya. Banyak faktor yang dapat dilakukan oleh UMKM agar dapat bertahan hidup meski telah terdampak wabah COVID 19. Diantaranya UMKM melakukan kerjasama dan saling berkolaborasi dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan produksi UMKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Dan Atase Industri di luar negeri untuk terus melakukan proses negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk-produk yang dihasilkan, serta para UMKM melakukan

penjualannya melalui daring, yang artinya mengubah model bisnis menjadi online dengan pemanfaatan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan, serta pengoptimalan seluruh sumber daya yang dimiliki agar menghasilkan produktivitas dalam produksi (Mussry, 2020).

UMKM di seluruh daerah di Indonesia berusaha untuk tetap *sustainabil* meski mengalami penurunan serta bantuan dari pemerintah pusat masih belum merata di setiap daerah. Dari sebab itu para UMKM saling membantu dan berkolaborasi dengan aparatur negara setempat agar tetap menopang perekonomian daerah agar tidak mengalami krisis.

Madura merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Timur yang perekonomiannya ditopang oleh sektor UMKM, keberadaan UMKM di Madura dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian juga menjadi upaya solutif dalam penyelesaian masalah ekonomi dan sosial. Pulau Madura sendiri memiliki empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dari keempat kabupaten itu memiliki potensi-potensi daerah yang cukup besar untuk dijadikan sebagai usaha. Sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi harapan dan menjadi solusi hidup bagi masyarakat di Madura.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Madura pada tahun 2018

Uraian	Nama Kabupaten			
	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep
jumlah unit usaha	15.962	14.447	26.944	16.214
jumlah tenaga kerja	63.349	55.322	104.507	62.998

sumber: badan pusat statistika Jawa Timur, 2018

Dilihat dari banyaknya usaha di setiap kabupaten yang ada di Madura yakni, pada kabupaten Bangkalan memiliki unit usaha sebesar 15,962 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 63.349. kabupaten Sampang memiliki unit usaha sebesar 14.447 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 55.322. kabupaten Pamekasan memiliki unit usaha sebesar 26.944 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar

104.507. kabupaten Sumenep memiliki unit usaha sebesar 16.214 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 62.998 (statistika, 2018).

UMKM di Madura tersebar atas beberapa sektor. Sektor kerajinan merupakan salah satu sektor terbesar di Madura. Dimana umkm batik tulis merupakan salah satu usaha terbanyak dari sektor kerajinan. Batik Madura mencerminkan ke unikan, serta karakteristik yang mencerminkan ekspresi budaya madura. Batik yang dimiliki Madura memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan batik lainnya. Baik dari segi warna, desain motif, dan teknik pembuatan yang merupakan ciri khas dan menjadi daya tarik tersendiri. (Pinujib, 2016). UMKM batik merupakan potensial di Madura yang juga ikut mengalami penurunan permintaan akibat adanya pandemi COVID 19. Pemicu penurunan tersebut di sebabkan adanya aturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar sehingga dilakukan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa, untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Untuk menghadapi krisis ekonomi UMKM dituntut melakukan perubahan guna meningkatkan daya saing agar dapat terus berjalan dan berkembang khususnya UMKM batik di Madura. Untuk itu penelitian yang berkaitan dengan UMKM batik di Madura yang dapat bertahan sehingga bisnis tetap berlanjut perlu untuk dilaksanakan, sebab UMKM batik merupakan usaha terbesar di madura. Salah satu tahap dalam mencapai proses bisnis yang berkelanjutan. Perlu di lakukan menganalisis faktor sehingga dapat membuat model penentu *sustainable entrepreneurship* pada UMKM yang bisa dijadikan solusi dan patokan dalam memperjelas untuk bertahan meski terdampak wabah COVID 19. Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM batik di empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Dengan menggunakan Metode PLS (*Partial Least Square*), metode ini digunakan memiliki tujuan untuk mengetahui model *sustainable entrepreneurship* pada UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Tidak diketahuinya faktor-faktor penentu untuk pembentukan *sustainable entrepreneurship* UMKM batik yang terdampak wabah COVID 19 di Madura?
2. mengetahui solusi untuk membangun *sustainable entrepreneurship* pada UMKM batik yang terdampak wabah COVID 19 di Madura sesuai faktor-faktor yang ada.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah mengenai penelitian ini maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor pembentukan *sustainable entrepreneurship* UMKM batik pada 4 kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.
2. Membangun strategi berdasarkan model *sustainable entrepreneurship* pada faktor-faktor utama.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan usulan kepada pelaku UMKM, pemerintah, dan akademisi tentang beberapa faktor-faktor utama dalam pembentukan *sustainable entrepreneurship* UMKM yang terdampak wabah COVID 19 sehingga dapat bertahan dan berkembang.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk memfokuskan kajian yang dilaksanakan. Sehingga tidak meluas, maka pembatasan masalah sebagai berikut:

1. UMKM yang menjadi obyek penelitian ini dibatasi pada UMKM batik.

2. Penelitian dilaksanakan pada UMKM batik di empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Selama penelitian UMKM batik yang terdampak COVID 19 tidak mengalami kebangkrutan.